

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

#### **2.1. Kabupaten Jepara**

##### **2.1.1. Kondisi Demografis**

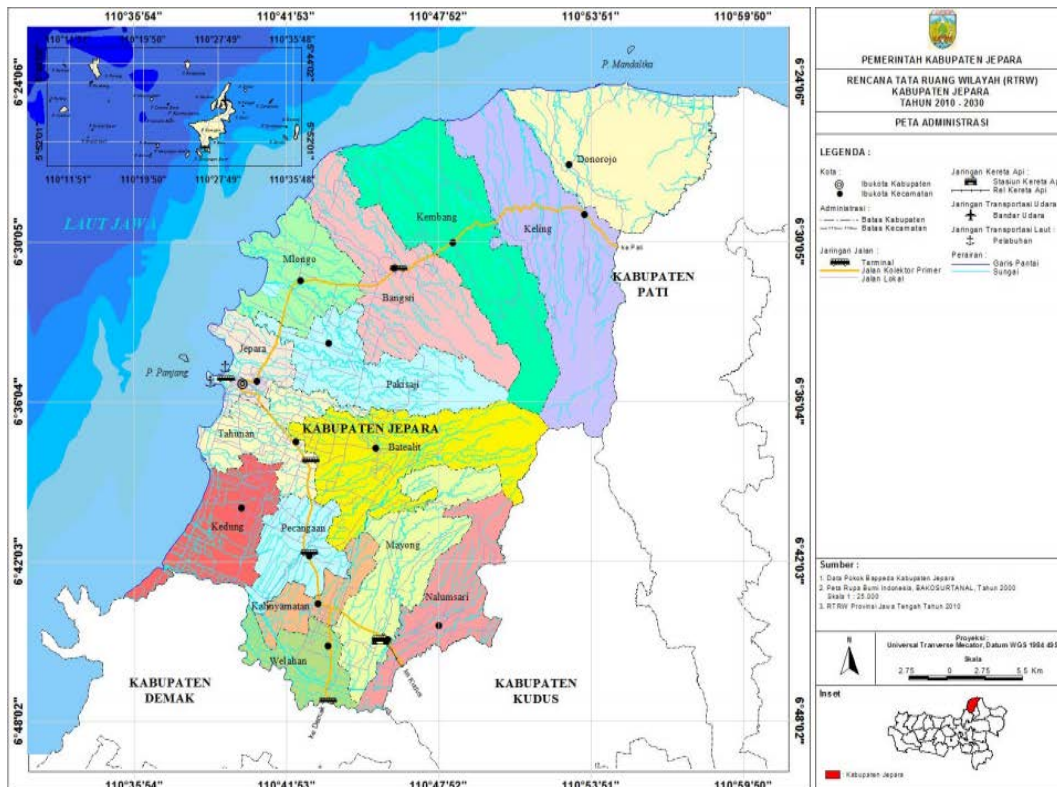
Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Kabupaten Jepara letaknya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan, serta 1.015 RW dan 4766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

Menurut BPS Kabupaten Jepara, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Jepara adalah 1.205.800 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebesar 601.206 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 604.594 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif adalah 818.838 jiwa sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah 386.962 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jepara yaitu sebesar 3560 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Karimunjawa yaitu sebesar 130 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan

penduduk yang tinggi di Kecamatan Jepara diakibatkan karena aktifitas ekonomi masyarakat sebagian besar terpusat di kecamatan tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Jepara**



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara 2010-2030

### 2.1.2. Kondisi Sosial-Ekonomi

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui 3 hal yaitu pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan masyarakat. Menurut survei BPS Kabupaten Jepara tahun 2015, persentase jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf adalah sebesar 94,46%, dengan rincian persentase laki-laki melek huruf sebesar 97,99% dan perempuan melek huruf sebesar 91,04%. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk secara

keseluruhan di Kabupaten Jepara sudah baik, meski ada perbedaan yang cukup signifikan antara persentase laki-laki yang melek huruf dengan perempuan yang melek huruf. Persentase melek huruf perempuan jumlahnya lebih rendah 6,95% dibandingkan dengan laki-laki.

**Tabel 2.1**  
**Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**  
**(Penduduk Usia 15 Tahun ke atas)**

<b>Pendidikan Tertinggi</b>	<b>Laki-laki (%)</b>	<b>Perempuan (%)</b>
Tidak/belum pernah sekolah	2,77	10,04
Tidak tamat SD	12,21	14,61
SD/MI	36,53	33,23
SMP/MTs	25,36	21,17
SMA/MA	18,03	15,58
Perguruan Tinggi	5,10	5,37

*Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2015*

Persentase melek huruf perempuan yang lebih rendah 6,95% dibandingkan laki-laki memiliki korelasi dengan banyaknya jumlah perempuan yang tidak/belum pernah bersekolah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. Pada tabel tersebut persentase perempuan yang tidak/belum bersekolah mencapai 10,04%, padahal persentase laki-laki yang tidak/belum pernah bersekolah hanya 2,77%.

Faktor kedua yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi suatu masyarakat adalah mata pencaharian. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Jepara paling banyak menekuni profesi di bidang industri pengolahan. Dua industri yang terkenal di Kabupaten Jepara adalah industri mebel (*furniture*) dan industri ukir. Industri mebel dan ukir Jepara begitu terkenal hingga mampu menembus pasar ekspor di berbagai negara. Sekitar 60% produk mebel Jepara dijual ke pasar mancanegara dan sisanya ke pasar

dalam negeri. Pada akhir masa jayanya, sekitar tahun 2006, nilai bisnis mebel dan ukir mencapai angka Rp 1,3 triliun. Jumlah perusahaan yang terlibat di industri ini mencapai 518 perusahaan, sementara jumlah tenaga kerjanya 27.271 orang. Jumlah tenaga kerja yang besar tersebut menandakan bahwa industri mebel dan ukir telah membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Jepara. Profesi yang ditawarkan dalam industri tersebut misalnya sebagai pengukir, tukang kayu, tenaga *finishing*, tenaga amplas, tenaga servis mebel dan tenaga penggergajian.

**Tabel 2.2**  
**Lapangan Pekerjaan Utama**

<b>Lapangan Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	50.382	23.783
Pertambangan dan Penggalian	3.383	1.079
Industri Pengolahan	155.735	105.662
Listrik, Gas dan Air	1.571	0
Bangunan	52.529	707
Perdagangan besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	39.804	71.417
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	15.393	2.006
Keuangan, Asuransi Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	4.599	0
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	27.778	27.560

*Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2015*

Memasuki tahun-tahun berikutnya, jumlah pemilik industri mebel dan ukir Jepara mengalami penurunan hingga 10% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sulit dan mahalnya harga bahan baku kayu. Bahan baku tersebut harus diperoleh dari luar Kabupaten Jepara dan harganya pun mahal karena setiap tahun harga kayu Perhutani naik. Solusi mendatangkan kayu dari luar Jawa tidak selalu bisa dijadikan pilihan karena menyebabkan biaya produksi membengkak.

Permasalahan lain yang menyebabkan turunnya jumlah pemilik industri mebel rumahan adalah sulitnya mencari tenaga kerja. Sekarang ini, baik tukang kayu maupun tukang amplas lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik baru yang bermunculan di Jepara karena upah bekerja di pabrik lebih tinggi. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang menurunkan jumlah industri mebel dan ukir. Kini, produsen mebel rumahan lebih memilih menjadi eksportir yang hanya bermodalkan *gadget*. Mereka hanya menunjukkan gambar mebel yang diproduksi oleh orang lain beserta daftar harganya secara *online*. Dengan kata lain mereka beralih menjadi perantara jual beli mebel dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri mebel dan ukir membuat pemerintah segera merealisasikan langkah-langkah nyata agar industri tersebut bisa tetap berkembang. Salah satu hal yang telah dilakukan pemerintah adalah memberi identitas Kabupaten Jepara sebagai *The World Carving Center* pada tahun 2007. *Branding* tersebut dipilih selain karena unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain, juga untuk menunjukkan bahwa ukir menjadi nafas hidup dan urat nadi perekonomian masyarakat Jepara. Untuk mendukung *branding*, pemerintah melakukan pemberdayaan pengrajin ukir, menguatkan SDM dengan memberi kurikulum muatan lokal mengukir untuk jenjang pendidikan dasar, membuka program atau jurusan ukir di SMK-SMK Jepara, mengadakan berbagai lomba mengukir, mengadakan pameran ukir serta mewajibkan kantor dan gedung milik pemerintah memasang ornamen ukir di bangunan luarnya. Program memasang ornamen ukir pada bangunan pemerintah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Nomor 10 Tahun 2014. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Jepara juga membangun *Jepara Trade and Tourism Center (JTTC)* pada tahun 2003. JTTC sebagai pusat perbelanjaan utama di Jepara ini berkonsep sebagai pasar seni sehingga sering disebut JTTC Arts Mall. JTTC berguna agar masyarakat dapat menjual dan menawarkan produk-produk asli Jepara baik berupa makanan oleh-oleh khas Jepara, mebel, tenun troso, batik Jepara serta berbagai paket wisata.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi adalah tingkat pendapatan masyarakat yang dapat dilihat melalui pengeluaran per kapita dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat.

**Tabel 2.3**  
**IPM Kabupaten Jepara Tahun 2012-2014**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>IPM</b>	<b>68,45</b>	<b>69,11</b>	<b>69,61</b>
Angka Harapan Hidup	75,61	75,63	75,64
Rata-rata Lama Sekolah	6,96	7,09	7,29
Rata-rata Harapan Lama Sekolah	11,82	12,06	12,25
Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)	8.999	9.177	9.195

*Sumber: BPS Kabupaten Jepara*

Pengeluaran per kapita masyarakat Jepara dapat dilihat pada Tabel 2.3 yang merupakan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara. Data menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Jepara dari tahun ke tahun semakin tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat meningkat dan menandakan perekonomian masyarakat semakin baik.

Pendapatan masyarakat juga pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan melalui melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu

tahun. Berikut merupakan tabel perkembangan PDRB Kabupaten Jepara dari tahun 2013 hingga 2015:

**Tabel 2.4**  
**PDRB atas Dasar Harga Berlaku**

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (dalam miliar rupiah)		
	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.922,60	3.099,87	3.381,61
Pertambangan dan Penggalian	310,29	367,83	424,65
Industri Pengolahan	5.958, 01	6.839,24	7.574,05
Pengadaan Listrik dan Gas	17,44	17,85	18,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,78	13,26	13,98
Konstruksi	1.159,39	1.326,57	1.471,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.192,14	3.394,68	3.691, 32
Transportasi dan Pergudangan	661	743	815
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	668,30	767,08	870,64
Informasi dan Komunikasi	394,77	462,71	512,51

*Sumber: BPS Kabupaten Jepara*

Data pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa semua sektor usaha di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan PDRB setiap tahunnya. Perkembangan tertinggi PDRB dicapai oleh sektor usaha industri pengolahan yaitu dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami kenaikan sebesar 1.616,04 miliar rupiah. Sedangkan kenaikan terkecil dicapai oleh usaha pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 1,15 miliar rupiah.

### **2.1.3. Kondisi Sosio-Kultural**

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Jepara berhubungan dengan letak Kabupaten Jepara yang merupakan daerah pesisir. Letak tersebut menyebabkan

banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan, terutama penduduk yang tempat tinggalnya berdekatan dengan pantai. Dari segi budaya, masyarakat nelayan memiliki tradisi tersendiri yang berkaitan dengan upacara tradisional. Upacara yang terkenal adalah upacara sedekah laut atau lomban. Lomban pada awalnya adalah tradisi yang dipelihara dan dilaksanakan oleh nelayan di Desa Ujungbatu. Namun seiring perkembangannya, lomban kini telah menjadi tradisi masyarakat Jepara pada umumnya. Pesta lomban merupakan puncak dan sekaligus penutup acara Syawalan yang diselenggarakan satu minggu setelah hari raya Idul Fitri. Lomban dimulai dengan acara selamatan penyembelihan kerbau. Daging kerbau dibagi-bagikan kepada masyarakat sedangkan kepala kerbau dilarung ke laut sebagai sedekah bagi penguasa laut. Bagi masyarakat Jepara sekarang ini, upacara lomban lebih dimaknai sebagai ucapan syukur, terutama rasa syukur kaum nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena selama setahun penuh telah memberikan penghidupan kepada masyarakat nelayan sekaligus sebagai pengharapan agar hasil di tahun berikutnya mengalami peningkatan. Meski begitu, di satu sisi upacara lomban masih terkait dengan unsur-unsur budaya lama yang mengaitkan rasa syukur tersebut dengan Sang Penguasa Laut. Masyarakat percaya apabila lomban tidak dilakukan maka akan timbul bencana besar yang akan menimpa masyarakat nelayan berupa ombak yang terlalu lama, angin kencang dan pepohonan besar yang runtuh.

Tradisi kedua yang terkenal adalah kirab yang dilakukan sehari menjelang Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara. Kirab ini sebagai rasa syukur masyarakat Jepara terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta untuk memohon keselamatan bagi



seluruh masyarakat. Tradisi ini juga berkaitan dengan penghormatan kepada Pangeran Hadirin dan Ratu Kalinyamat atas segala jasa yang pernah mereka lakukan. Upacara tradisi Hari Jadi Kabupaten Jepara ini menampilkan aksi-aksi berupa tarian atau drama yang menggambarkan keberanian Ratu Kalinyamat ketika memimpin ekspedisi ke Malaka mengusir penjajah Portugis. Meski penyerangan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, namun ekspedisi yang melibatkan 300 kapal besar beserta 15.000 prajurit Jawa pilihan telah membuat Portugis jera sehingga tanah Jawa terbebas dari penjajahan Portugis. Peristiwa penyerangan ke Malaka tersebut telah membuat nama Jepara terkenal sebagai kota pelabuhan yang cukup strategis.

Segala upacara atau tradisi yang dilakukan di Kabupaten Jepara tentunya disesuaikan dengan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat setempat. Masyarakat Jepara mayoritas beragama Islam yang persentase jumlahnya mencapai angka 97,88%. Untuk masyarakat muslim sendiri, mayoritas mengikuti organisasi masyarakat Nadhatul Ulama (NU), sedangkan sebagian kecil merupakan penganut Muhammadiyah.

Nadhatul Ulama lahir di Jepara pada tahun 1930-an. NU pada mulanya hanyalah organisasi sosial keagamaan yang lebih fokus pada persoalan-persoalan kehidupan sosial keagamaan para warganya. Pada perkembangannya, NU menjelma menjadi organisasi yang memang masih berjalan pada koridor sosial keagamaan namun turut mewarnai kehidupan politik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jepara. Keterlibatan NU dalam politik dapat dilihat dari adanya Kiai pengikut organisasi NU yang turut berkecimpung di bidang politik praktis.

Kegiatan Kiai dalam politik di Jepara terpolarisasi pada dua partai politik yaitu PPP dan PKB. Dua partai yang mendapat dukungan NU ini, terutama PPP, telah menjadi partai yang kuat di Jepara. Terbukti pada tahun 2004 PPP mendapatkan 14 kursi di DPR dari total 50 kursi. Di tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2009 dan 2014, PPP juga masih menjadi partai yang masuk dalam 3 besar partai peraih suara terbanyak di parlemen. Kemudahan NU untuk berkembang dan besar di Jepara dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena pemerintah memberikan kemudahan pada NU untuk berdakwah. Pemerintah tidak membatasi perkembangan organisasi NU sehingga NU hingga kini terorganisir dengan baik dari mulai wilayah pusat hingga daerah. NU di Jepara memiliki 10 badan otonom yang menaungi berbagai kalangan masyarakat dari berbagai usia dan kepentingan. Kesepuluh badan otonom tersebut adalah: a) Jam'iyah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMN) yang membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang diakui di lingkungan NU serta membina dan mengembangkan seni hadrah; b) Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH) yang melaksanakan kebijakan pada kelompok qari/qari'ah (pembaca tilawah Al-Quran) serta hafidzh/hafizhah (penghafal Al Quran); c) Muslimat yang melaksanakan kebijakan pada perempuan NU; d) Fatayat yang melaksanakan kebijakan pada perempuan muda NU; e) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU; f) Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU) yang melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa dan santri laki-laki; g) Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama (IPPNU) yang melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa dan santri perempuan; h) Ikatan Sarjana dan Nadhatul Ulama

(ISNU) yang melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual; i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Saburmusi) yang melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan; j) Pagar Nusa yang melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri. Kesepuluh badan otonom tersebut telah membantu NU melekat dan mendapat dukungan masyarakat. Badan otonom yang telah disebutkan sebelumnya beberapa terkait dengan bidang pendidikan, yang berarti NU berusaha membantu membangun pendidikan yang baik bagi masyarakat. Di Jepara banyak berdiri pesantren dan sekolah yang basis pengurus dan anggotanya adalah masyarakat pengikut NU, salah satu yang terkenal adalah Pesantren Darul Falah yang diasuh oleh Kiai Taufiqul Hakim. Basis NU yang berkembang di kalangan pesantren ini turut memperkuat kekuatan NU dalam politik. Santri-santri memiliki tingkat fanatisme yang tinggi terhadap Kiai mereka, sehingga apabila Kiai membutuhkan dukungan dalam berpolitik, santri akan sepenuh hati mendukung Kiai-nya.

Berbeda dengan Nadhatul Ulama, pengikut Muhammadiyah di Jepara jauh lebih sedikit. Salah satu penyebabnya karena ajaran Muhammadiyah memiliki tujuan utama untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan yang dimaksud adalah ketika ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Ajaran Muhammadiyah benar-benar menjalankan ajaran Islam tanpa mengadaptasinya dengan budaya Jepara, oleh karena itu banyak warga Jepara yang merasa tidak cocok dengan ajaran ini. Masyarakat Jepara lebih dapat menerima ajaran Islam yang di dalam pelaksanaannya masih menghormati unsur-

unsur budaya setempat, mengingat Kabupaten Jepara merupakan daerah pesisir yang masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan bersifat tradisional seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya. Sama seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah sebagai ormas Islam juga turut berkecimpung dalam dunia politik praktis, namun gaungnya tidak sekuat partai-partai yang massanya berbasis NU. Partai Amanat Nasional (PAN) yang identik dengan Muhammadiyah hanya mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Jepara pada Pileg 2004, kemudian mendapat 3 kursi pada Pileg 2009 dan Pileg 2014.

#### **2.1.4. Kondisi Pemerintahan**

Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Jepara diikuti oleh 12 partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) , Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Jumlah partai politik peserta pemilu yang hanya 12 ini berbeda jauh dengan peserta Pileg pada tahun 2004 silam yang mencapai 24 parpol dan Pileg 2009 yang diikuti 29 parpol. Pada Pileg 2014 Jepara terbagi dalam 5 Dapil. Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Jepara, Kedung, Tahunan dan Karimunjawa. Dapil II meliputi Kecamatan Mlonggo, Pakis Aji dan Bangsri. Dapil III meliputi Kecamatan Donorojo, Kembang dan Keling. Dapil IV meliputi Kecamatan Welahan, Mayong dan Nalumsari. Dapil V meliputi Kecamatan Batealit, Pecangaan dan Kalinyamatan. Pileg diikuti oleh 478 caleg yang terdiri atas 299 caleg laki-laki

dan 179 caleg perempuan. Jumlah ini menurun dari jumlah Pileg sebelumnya pada tahun 2009 yaitu sebanyak 526 orang dengan perincian 375 caleg laki-laki dan 151 caleg perempuan.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Nama Anggota Legislatif**  
**Hasil Pileg Kabupaten Jepara Tahun 2014**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Partai</b>
1	H. Pratikno	Nasdem
2	Sunarto, S.Sos	Nasdem
3	Sumarsono, S.Pd	Nasdem
4	Agus Riyono	Nasdem
5	Fitriyawati Aisyah	Nasdem
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si	PKB
7	H. Nur Hamid	PKB
8	Kholis Fuad, S.H.I.	PKB
9	Hj. Quriyah	PKB
10	Moh. Siraj, B.A.	PKB
11	Saifuddin	PKS
12	H. Arofiq, S.T., M.T.	PKS
13	Dul Khalim	PDIP
14	H. Yuni Sulisty, S.H.	PDIP
15	Dian Kristiandi, S.Sos	PDIP
16	Edy Arianto	PDIP
17	Drs. Junarso	PDIP
18	H. Toyib	PDIP
19	Sunarto	PDIP
20	Sutrisno	PDIP
21	H. Yuli Nugroho, S.E.	PDIP
22	Arik Sunarso	PDIP
23	H. Akhmad Faozi, S.T.	Golkar
24	Drs. Sugiyono	Golkar
25	Harmanto, S.E	Golkar
26	H. Japar, S.E.	Golkar
27	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Golkar
28	H. Aris Isnandar, S.T.	Gerindra
29	Afrizal Wahyu Hidayat, S.E.	Gerindra
30	Ali Ronzi Ach	Gerindra
31	Purwanto	Gerindra
32	Bangun Trihastanto, S.H.	Gerindra
33	H. Muzaidi, A.Md	Gerindra
34	Achmad Harmoko, S.E.	Gerindra

35	Hj. Sri Lestari, S.H	Gerindra
36	Eko Sudarmaji, S.H.	PAN
37	Drs. H. Muslih, M.H.	PAN
38	H. Bambang Harsono, SH, MH.	PAN
39	H. Shodiq Priyono	PPP
40	H. Agus Sutisna, S.H.	PPP
41	H. Achmad Marchum, S.Sos	PPP
42	H. Masykuri	PPP
43	H. Imam Zusdi Ghozali, S.H.	PPP
44	H. Mohammad Adib	PPP
45	Wahyu Mukhammadin, S.E.	PPP
46	H. Subangun	PPP
47	Ir. H. Noor Fuad, M.H.	PPP
48	H.Musadat, S.Pd.I	Hanura
49	Muhammad Aris, S.H.	Demokrat
50	Taufiq Rahman	Demokrat

Sumber: KPU Kabupaten Jepara

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa dari 12 partai politik yang menjadi peserta Pileg 2014, hanya 10 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Dua partai yang tidak mendapatkan kursi adalah Partai Bulan Bintang dan PKPI. Anggota DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilu Legislatif 2014 berjumlah 50 orang dengan rincian sebagai berikut: Partai Nasdem (5 orang), PKB (5 orang), PKS (2 orang), PDIP (10 orang), Golkar (5 orang), Gerindra (8 orang), PAN (3 orang), PPP (9 orang), Hanura (1 orang) dan Demokrat (2 orang). Anggota legislatif tersebut 24 orang adalah *incumbent* sedangkan yang lainnya adalah anggota pendatang baru. PDIP masih menjadi partai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat, terbukti 20% kursi di parlemen Kabupaten Jepara diduduki oleh anggota legislatif yang berasal dari PDIP. Partai yang berada di urutan kedua dalam hal jumlah kursi yang didapatkan adalah PPP dengan perolehan 9 kursi, kemudian baru disusul oleh Gerindra dengan perolehan 8 kursi. Hasil ini tidak berbeda dengan hasil Pileg 2009 dimana PDIP, PPP dan Gerindra menjadi 3 partai politik yang

mendapat kursi paling besar di parlemen. Meski begitu, hasil Pemilu 2009 dan 2014 merupakan hasil yang kurang bagi PPP karena perolehan suaranya turun drastis. Pada Pemilu Legislatif 2004, PPP menjadi pemenang di Jepara dengan perolehan total 14 kursi, yang kemudian disusul oleh PKB dengan 9 kursi dan PDIP dengan 8 kursi. Penurunan hasil yang diperoleh PPP ini disebabkan oleh adanya faktor partai-partai politik baru yang muncul di Jepara, sehingga menggeser popularitas PPP di mata masyarakat.

Terkait dengan gender, hasil Pileg 2014 Kabupaten Jepara menunjukkan masih adanya ketimpangan gender yang nyata di dunia politik, terbukti dari total 50 anggota DPRD, hanya 3 saja anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan yaitu Fitriyawati Aisyah dari Nasdem, Hj. Quriyah dari PKB dan Hj. Sri Lestari dari Gerindra. Hasil ini sama dengan hasil Pileg 2009 dimana perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan hanya 3 orang. Padahal pada Pileg 2004 jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan lebih banyak yaitu 4 orang dari total 50 orang (keterwakilan perempuan sebesar 6%). Jumlah keterpilihan perempuan yang amat sedikit ini salah satunya disebabkan oleh jumlah caleg perempuan yang jumlahnya memang masih sedikit. Rata-rata partai politik hanya memasang 3 calon perempuan saja dalam satu dapil, padahal total seluruh caleg di satu dapil rata-rata berkisar antara 8-10 orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa rata-rata parpol hanya mengajukan 3 orang caleg perempuan saja di setiap dapil, yang berarti parpol-parpol tersebut mengikuti jumlah minimal keterwakilan perempuan yaitu 30% seperti yang diamanatkan undang-undang. Faktor lain yang turut mempengaruhi sedikitnya caleg perempuan yang terpilih adalah nomor urut.

Hampir tidak ada partai politik di Jepara yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut pertama. Posisi nomor urut tertinggi perempuan kebanyakan adalah mulai dari nomor urut 3, lalu berlanjut ke nomor urut besar selanjutnya. Partai politik terkesan hanya mengajukan nama-nama caleg perempuan untuk memenuhi tuntutan jumlah minimal caleg perempuan yaitu sebesar 30% tanpa benar-benar memperjuangkan agar perempuan lolos menjadi anggota dewan.

Dukungan dari partai politik yang memiliki kekuatan turut berpengaruh pada kemenangan calon yang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Jepara. Pada Pemilu Legislatif 2004, partai politik yang menjadi peserta Pemilu mencapai jumlah 24 partai, sehingga pada Pilkada 2007 masing-masing pasangan calon yang maju dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati diusung oleh koalisi banyak partai politik. Pilkada 2007 memiliki 3 calon yaitu Masun Duri-Eko Sudarmaji yang diusung oleh Golkar dan PAN, Nur Yachman-Nurhadi yang diusung gabungan PKB, PKPB, Partai Merdeka, PPDI, dan PPDK serta Hendro Martojo-Ahmad Marzuki yang diusung PPP, Partai Demokrat, PDS, dan sejumlah partai non-kursi. Pada Pilkada tersebut, Hendro Martojo dan Ahmad Marzuki keluar sebagai pemenang dan mendapatkan kursi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Persentase perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut: Masun Duri-Eko Sudarmaji (5,57%), Nur Yahman-Nurhadi (34,97%) dan Hendro Martojo-Ahmad Marzuki (59,46%). Keemenangan Hendro-Marzuki tidak terlepas dari popularitas PPP yang kala itu menjadi partai pemenang di Jepara.

Pilkada selanjutnya yaitu Pilkada 2012 diikuti oleh pasangan calon yang jumlahnya lebih banyak yaitu 4 pasangan calon. Keempat pasangan calon itu



adalah Yuli Nugroho-Nuruddin Amin yang diusung PDIP, PKB, PKS, PKNU, PDS, PKPB, dan PKP, Khaeron Syarifudin-Ahmad Ja'far diusung Partai Demokrat dan Hanura, Ahmad Marzuki-Subroto diusung PPP, PAN, dan PKPI, dan Nur Yahman-Aris Isnandar diusung Partai Golkar dan Gerindra. Tiga partai besar yang menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009 masing-masing mendukung pasangan calon yang berbeda. PPP mendukung Ahmad Marzuki-Subroto, PDIP mendukung Yuli Nugroho-Nuruddin Amin dan Gerindra mendukung Nur yahman-Aris Isnandar. Hasil Pilkada 2012 akhirnya meloloskan Ahmad Marzuki-Subroto sebagai Bupati-Wakil Bupati. Persentase perolehan suara masing-masing paslon adalah: Ahmad Marzuki-Subroto (42,49%), Nur Yahman-Aris Isnandar (36,17%), Yuli Nugroho-Nuruddin Amin (18,3%) dan Khaeron Syarifudin-Ahmad Ja'far (3,04%). Dengan perolehan suara lebih dari 30%, maka pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara hanya berlangsung satu putaran. Kemenangan Ahmad Marzuki-Subroto menandakan bahwa PPP masih populer di masyarakat. Selain itu, faktor kemenangan juga disebabkan karena Ahmad Marzuki periode sebelumnya telah menjabat sebagai wakil bupati dan rakyat Jepara kembali memberikan kepercayaan padanya untuk memimpin.

Pilkada terbaru di Kabupaten Jepara adalah Pilkada 2017 yang baru saja berlangsung bulan Februari lalu. Dalam Pilkada tersebut hanya ada dua pasangan calon yaitu Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi yang hanya diusung oleh PDIP dan pasangan calon Subroto-Nur Yahman yang didukung oleh 8 partai politik yakni Partai Gerindra, PKB, PPP, PKS, Hanura, Golkar, PAN, Nasdem, dan Demokrat.

Pilkada 2017 meloloskan kemabali Ahmad Marzuki sebagai Bupati Jepara dengan didampingi wakil barunya yaitu Dian Kristiandi yang dulunya sebelum Pilkada 2017 merupakan Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Selisih perolehan suara kedua pasangan calon sangat sedikit. Marzuki-Dian mendapatkan 51,25% suara sedangkan Subroto-Nur Yahman mendapatkan 48,75% suara. Hasil Pilkada 2017 menunjukkan bahwa PDIP yang merupakan partai pemenang pada Pileg 2014 mampu menanamkan pengaruh yang kuat di masyarakat, sehingga calon yang diusungnya sendiri dapat mengalahkan paslon yang diusung oleh koalisi 8 partai lain.

Selain kekuatan partai politik di parlemen dan kemenangan pasangan calon yang didukung parpol dalam Pilkada, tingkat partisipasi pemilih pun menjadi salah satu hal penting yang dapat menggambarkan kondisi pemerintahan di Kabupaten Jepara. Jenis Pemilu yang menarik partisipasi paling besar dari masyarakat adalah Pemilu Legislatif. Pileg 2004 memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebesar 67%, lalu pada 2009 naik menjadi 72% dan akhirnya pada Pileg 2014 tingkat partisipasi masyarakat melejit menjadi 79,45%. Lain dengan Pileg, Pemilu Bupati-Wakil Bupati tidak mendatangkan respon yang terlalu tinggi dari masyarakat. Pada Pemilu Bupati-Wakil Bupati 2007 tingkat partisipasi pemilih hanya 55%, lalu pada tahun 2012 jumlahnya naik menjadi 65%. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat memang naik secara signifikan yaitu mencapai 73,9%, namun jumlah tersebut masih belum memenuhi target KPU RI yaitu sebesar 77,5%. Berikut adalah data tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Jepara mulai dari Pemilu yang tahun 2004 hingga Pemilu tahun 2017:

**Tabel 2.6**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih**  
**Pemilihan Umum Kabupaten Jepara**

Nama Pemilu	Jumlah Pemilih	Partisipasi Pemilih			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2004	726.252	-	-	486.054	67
Pemilu Presiden-Wakil Presiden Putaran II Tahun 2004	741.079	-	-	521.424	70
Pemilu Bupati-Wakil Bupati 2007	779.630	190.109	237.712	427.821	55
Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009	808.870	272.539	306.951	579.490	72
Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009	814.664	264.145	309.671	573.816	70

Pemilu Bupati- Wakil Bupati 2012	825.402	244.374	294.225	538.599	65
Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014	839.147	313.833	356.528	670.361	79,45
Pemilihan Bupati- Wakil Bupati 2017	865.345	-	-	693.893	73,9

*Sumber: KPU Kabupaten Jepara, 2004-2017*

Tidak seperti Pileg dan Pilbup, tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pilpres tidak fluktuatif. Data dari tahun 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sama besar, yaitu 70%. Terkait dengan gender, jumlah perempuan yang berpartisipasi memberikan suaranya dalam Pemilu jumlahnya selalu lebih banyak daripada laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah karena memang jumlah perempuan yang memiliki hak pilih jumlahnya lebih besar daripada laki-laki yang memiliki hak pilih.

## **2.2 Partai Keadilan Sejahtera(PKS)**

### **2.2.1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indonesia**

PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998 lewat sebuah konferensi pers di aula masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi Kementrian Kehutanan dan Perkebunan di bawah kabinet pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid yang mengakibatkan Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri sebagai presiden partai karena dicalonkan menjadi menteri. Nurmahmudi kemudian digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 3 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) bergabung dengan PK dan kemudian resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Selanjutnya Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PKS periode 2005-2010. Pada saat pemerintahan SBY, Tifatul Sembiring dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika sehingga estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq. Sejak 10 Agustus 2015 sampai sekarang Presiden PKS dijabat oleh Sohibul Iman.

PKS, seperti halnya partai politik lain, juga memiliki nama dan lambang yang sesuai dengan landasan filosofis partai. Perihal nama, kalangan PKS mendefinisikan keadilan ialah menempatkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas. Sedangkan sejahtera berarti menyediakan ruang bagi setiap orang untuk memperoleh hak asasinya, juga mewadahi semua potensi, inovasi dan ketrampilannya. Kesejahteraan juga menebarkan rasa aman sehingga tidak ada lagi kaum minoritas yang merasa didzalimi oleh kaum mayoritas. Sedangkan mengenai lambang, bentuk gambar kotak memiliki makna kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan dan kesinambungan sejarah. Untaian tujuh belas melambangkan sikap adil, ukhhuwah, istiqomah, berani, tegas dalam mewujudkan kesejahteraan dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Selain makna gambar, warna dalam lambang PKS pun memiliki arti tersendiri. Warna putih melambangkan bersih, suci dan mulia. Warna hitam melambangkan aspiratif, akomodif dan kepastian. Sedangkan warna emas sebagai lambang kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.

**Gambar 2.2**

**Lambang Partai Keadilan Sejahtera**



Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi dan misi yang tentunya telah disesuaikan dengan landasan filosofis dan ideologisnya. Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah: *Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.*

**Masyarakat madani** yang dimaksud adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis serta bergotong-royong menjaga kedaulatan negara. PKS sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional untuk mewujudkan masyarakat madani dengan cara mempercepat realisasi target PKS dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh” agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur.

**Adil** yang dimaksud adalah kondisi kualitas kehidupan (pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya) ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas, seimbang dan tidak melewati batas. Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Setiap individu dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Selain itu, keadilan menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang mereka anut. Konsekuensinya,

setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan.

**Sejahtera** secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Prinsip sejahtera dalam konteks perekonomian menyetarakan peran kapital (modal) dan usaha (buruh) yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil, sehingga semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Penyimpangan etika, perilaku eksploitatif, konsumtivisme, dan hedonistik-materialistik juga harus dapat diminimalisasi karena pembangunan ditujukan bukan untuk kemajuan materi saja, melainkan juga demi tetap terpeliharanya sifat asasi dan martabat seluruh manusia. Memprioritaskan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama harus dilakukan di atas keuntungan pribadi dan kelompok.

**Bermartabat** menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya



adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.

**Misi** yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:

- 1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas

kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

- 2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources and knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
- 3) Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan,

mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mawadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai misi, PKS memiliki 21 platform kebijakan. Adapun 21 butir platform kebijakan PKS yaitu: (1) Pemantapan ekonomi makro; (2) Pemantapan otonomi daerah; (3) Pemberdayaan ekonomi rakyat; (4) Perjuangan petani; (5) Perjuangan buruh; (6) Perjuangan nelayan; (7) Usaha kecil dan menengah; (8) Politik nasional; (9) Pertahanan keamanan; (10) Penegakan hukum dan perlindungan HAM; (11) Politik luar negeri; (12) Pendidikan nasional; (13) Kepeloporan Pemuda; (14) Perempuan Indonesia; (15) Pembinaan Keluarga; (16) Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial; (17) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; (18) Ilmu pengetahuan, teknologi dan industri; (19) Seni, budaya dan pariwisata; (20) Dakwah dan pembinaan umat beragama; (21) Komunikasi dan informasi.

### **2.2.2. Struktur Kepengurusan dan Sistem Kaderisasi PKS**

Struktur kepengurusan PKS dimulai dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) di tingkat nasional, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, Dewan Pengurus Cabang

(DPC) di tingkat kecamatan dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat desa/kelurahan. Berikut ini susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera:

**Tabel 2.7**

**Susunan Kepengurusan DPP PKS Tahun 2015-2020**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua Majelis Syuro	Dr Salim Segaf Al Jufri
Wakil Ketua Majelis Syuro	Dr Hidayat Nur Wahid
Sekretaris Majelis Syuro	Ir. H. Untung Wahono, M.S
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat	Suharna Surapranata, MT
Ketua Dewan Syariah	Dr KH Surahman Hidayat
Presiden	M. Sohibul Iman, Ph.D.
Sekretaris Jenderal	Mustafa Kamal, SS
Wakil Sekjen	Ir. Abdul Hakim, MM
Bendahara Umum	Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
Wakil Bendahara Umum	Dr. Abdul Kharis Almasyhari
Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi	H. Abdul Muiz Saadiah, MA
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri	Dr. Sukamta Manta Miharja
Ketua Badan Perencanaan	KH. Bukhori Yusuf, Lc, MA
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah	H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi	Drs. H. Musholli
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader	Deni Tresnahadi
Ketua Bidang Kaderisasi	Amang Syafruddin, Lc
Ketua Bidang Kepemudaan	Dr. Mardani Ali Sera
Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga	Asep Saefullah Danu
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Dra. Wirianingsih, M.Si (P)
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Ledia Hanifa Amaliah, SSi., M.PSi.T. (P)
Ketua Bidang Seni dan Budaya	Muhammad Ridwan
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Drs. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada	Drs. Chairul Anwar, Apt.

Ketua Bidang Kesra	Dr. Fahmy Alaydroes, MM., M.Ed.
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah	Dr. Ali Akhmadi
Ketua Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup	Ir. Memed Sosiawan, ME.
Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan	Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara	Dr. Hermanto
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan	Drs. H. Gufron Azis Fuadi
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar	Tate Qomarudin, Lc.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya	Ir. H. Sigit Sosiantomo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali Nusra	Sugeng Susilo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan	Hb. Aboe Bakar Al-Habsi, SE
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi	Drs. Cahyadi Takariawan, Apt.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur	Dr. H. Muhammad Kasuba, MA
Ketua Fraksi MPR RI	Ir. Tifatul Sembiring
Ketua Fraksi DPR RI	Dr. Jazuli Juwaini, Lc., MM.

*Sumber: Dewan Pengurus Pusat PKS, 2015*

Dari anggota yang masuk dalam kepengurusan PKS, hanya dua orang perempuan saja yang masuk dalam struktur kepengurusan. Mereka adalah Dra. Wirianingsih, M.Si yang menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga serta Ledia Hanifa Amaliah, SSi., M.PSi.T. yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PKS di tingkat nasional masih sangat rendah.

Inti kekuatan PKS berasal dari kader-kadernya, sesuai dengan AD-ART PKS Bab III Pasal 8, yaitu setiap WNI dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Sistem

kaderisasi di PKS berjenjang sesuai dengan kualitas dan loyalitas kadernya.

Adapun tingkatannya adalah:

1. Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai dan tercatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus dalam training orientasi partai tingkat pertama.
2. Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.
3. Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua.
4. Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjutan.
5. Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
6. Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli, dan
7. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.

Jenjang keanggotaan ini merupakan jenjang kaderisasi anggota PKS. Apabila seorang anggota telah memenuhi syarat dan kualitas yang ditetapkan, maka jenjang keanggotaannya dapat ditingkatkan. Seorang Anggota Pendukung harus melewati seleksi-seleksi yang dilakukan oleh kader hingga ia dianggap layak untuk naik tingkat menjadi Anggota Pemula. Selanjutnya Anggota Pemula akan melewati sistem kaderisasi untuk naik tingkat ke level keanggotaan selanjutnya, begitu seterusnya hingga seorang anggota mencapai jenjang kaderisasi tertinggi.

### **2.2.3. Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Jepara**

Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) BAB XI Dewan Pengurus Daerah pasal 17 ayat 2 menyebutkan dewan pengurus tingkat daerah berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara merupakan DPD yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, koordinator dan penanggung jawab musyawarah DPD adalah ketua majelis pertimbangan daerah.

DPD PKS Kabupaten Jepara menaungi Dewan Pengurus Cabang yang berada dalam kekuasaannya. Dewan Pengurus Cabang merupakan kepengurusan partai pada tingkat kecamatan. Di Kabupaten Jepara terdapat 16 Dewan Pengurus Cabang yang masing-masing membawahi Dewan Pengurus Ranting yang kepengurusannya berada di tingkat desa atau kelurahan.

Susunan Kepengurusan PKS Kabupaten Jepara periode 2015-2020 telah disusun sesuai dengan amanat undang-undang yaitu kepengurusan partai politik di

tingkat kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Susunan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara Periode Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**

**Susunan Kepengurusan DPD PKS Kabupaten Jepara Tahun 2015-2020**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua Umum	Khamidun Nugroho
Wakil Ketua	Abdul Haris Mahmudi
Sekretaris Umum	Bendhot Widoyo
Bendahara Umum	Yanuar
Wakil Bendahara Umum	Hartoyo
Ketua Bidang Kaderisasi	Ishaq
Ketua BPKK	Purdayanti (P)
Ketua Bidang Pemuda	Muhammad Hamdan
Ketua Bidang Seni Budaya	Melasari (P)
Ketua BKO	Abdul Rahman Saleh Wibowo
Ketua BPPP	H. Arofiq
Ketua Bidang Humas	Dewi Irawati (P)
Ketua Bidang Ekuintek	Ika Larasati (P)
Ketua BPU	Giyanto
Ketua Bidang Kesra	Nurus Syhadah (P)

*Sumber: DPD PKS Kabupaten Jepara, 2015*

DPD PKS Kabupaten Jepara memiliki serangkaian program kerja yang disusun sesuai dengan 21 platform kebijakan PKS di tingkat nasional. Adapun beberapa kegiatan DPD PKS Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020 yang telah dilakukan adalah:

- a) Menjalankan platform ke-20 yang berkaitan dengan Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama. Platform tersebut diwujudkan dengan cara mewajibkan pengurus PKS Kabupaten Jepara untuk khatam Al-Quran 3 kali selama bulan Ramadhan serta menghimbau pengurus agar sholat berjamaah 5 kali sehari di masjid. Program ini menjadikan puasa



ramadhan bukan hanya sebagai sarana penahan lapar, namun juga sarana perbaikan diri dan ibadah.

- b) Menjalankan kegiatan Kepeloporan Pemuda sesuai dengan platform kebijakan PKS ke 18 dengan cara memperbaiki akhlak pemuda. Pengurus PKS mengunjungi dan memberi santunan pada beberapa panti asuhan di Jepara sembari menerangkan bahaya narkoba bagi anak-anak panti asuhan yang mulai beranjak remaja.
- c) Guna menjaga kebersihan lingkungan dan higienitas daging qurban, panitia Qurban Daerah Pemilihan (DP) 5 PKS Kab. Jepara menyelenggarakan acara pemotongan hewan qurban di Rumah Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan Margoyoso Kab. Jepara pada (13/9/16). Pemotongan qurban di tengah pemukiman pada tahun-tahun terdahulu menyebabkan bau tidak sedap yang bertahan sampai seminggu. Akibatnya, lingkungan sekitar tempat pemotongan menjadi tidak nyaman. Karena itu, tahun ini DP 5 PKS yang terdiri dari DPC Kalinyamatan, DPC Pecangaan dan DPC Batealit berinisiatif menyelenggarakan kegiatan qurban di Rumah Pemotongan Hewan guna membangun kesehatan sesuai dengan amanat platform kebijakan PKS ke-16 yaitu Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- d) Sesuai dengan platform kebijakan PKS ke-6 yaitu Perjuangan Nelayan, DPD PKS Kabupaten Jepara mengadakan bakti sosial di Karimunjawa. Bakti sosial dilanjutkan dengan mengadakan temu tokoh dan nelayan.

Dalam pertemuan tersebut nelayan banyak mengeluh tentang terancamnya terumbu karang akibat ulah pencari ikan yang menggunakan metode “masker”. Dengan memakai masker nelayan sambil menyemprotkan apotas yang membuat ikan pingsan dan mengapung. Dengan cara ini ikan bisa didapatkan dalam jumlah banyak, namun di sisi lain terumbu karang menjadi rusak terkena apotas. Anggota DPD PKS yang datang berkunjung mendengarkan berbagai keluhan nelayan dan berusaha mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

- e) Terkait dengan platform kebijakan PKS ke-14 dan ke-15 yaitu tentang Perempuan Indonesia dan Pembinaan Keluarga, DPD PKS Kabupaten Jepara memiliki Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). BPKK mengkader para perempuan untuk memahami perannya sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai bagian dari kelembagaan. Adapun pembinaan keluarga dilakukan dengan menjalankan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang bertujuan meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. RKI memiliki 8 fokus kegiatan, yaitu: (1) Pembekalan pranikah; (2) Pendidikan untuk harmonisasi suami istri; (3) Pendidikan menjadi orang tua dan pengasuhan; (4) Pendidikan untuk lansia; (5) Pendidikan politik keluarga; (6) Peningkatan ekonomi keluarga; (7) Konsultasi masalah-masalah keluarga; (8) Sahabat anak dan remaja.